

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Persepsi

Persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sensasi adalah bagian dari persepsi, tetapi menafsirkan makna informasi sensorik tidak hanya membutuhkan persepsi sensorik, tetapi juga perhatian, harapan, motivasi, dan ingatan. (Soyomukti, 2012). Persepsi ini merupakan serangkaian proses yang rumit, dimana dengan proses ini kita memperoleh dan menginterpretasikan informasi indrawi. Interpretasi ini memungkinkan kita untuk menangkap dan memahami lingkungan secara lebih bermakna (Ling dan Catling, 2012). Sedangkan Harihanto (2001) mengutarakan bahwa persepsi adalah pendapat seseorang terhadap suatu objek atau stimulus. Akibat adanya stimulus tersebut, individu merespon (bereaksi) berupa menerima atau menolak stimulus tersebut. Stimulus dapat berupa objek, isyarat, informasi atau situasi dan keadaan tertentu. Persepsi mengacu pada pendapat dan evaluasi individu terhadap suatu stimulus, yang mengarah pada kehendak dan perasaan terhadap stimulus tersebut, serta motif-motif tertentu. Persepsi merupakan salah satu komponen kognitif yang meliputi keyakinan seseorang terhadap apa yang valid dan benar dalam hubungannya dengan objek sikap. Begitu keyakinan itu terbentuk, ia menjadi dasar pengetahuan tentang apa yang diharapkan dari suatu objek tertentu (Hendayana, 2014).

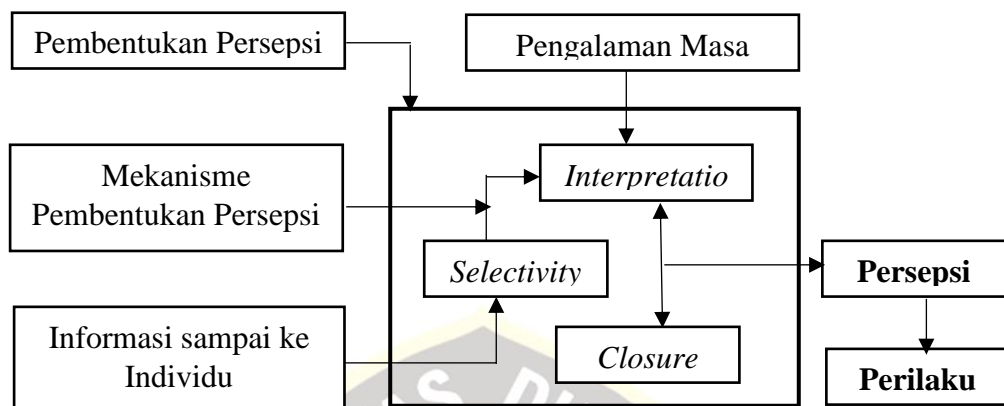
Persepsi bersifat sangat subyektif, artinya persepsi manusia bergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing individu, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda oleh masing-masing individu. Persepsi adalah pengolahan individu yang memberikan jawaban, makna, gambaran atau interpretasi terhadap apa yang dilihat, didengar atau dikenali oleh panca indera berupa sikap, pendapat dan perilaku atau yang disebut dengan perilaku individu. Persepsi seseorang atau kelompok bisa sangat berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain, meskipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri kembali ke perbedaan individu, perbedaan kepribadian, perbedaan sikap, atau perbedaan

motivasi. Pada dasarnya proses pembentukan persepsi terjadi pada manusia, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan pengetahuan.

2.2 Proses Terbentuknya Persepsi

Persepsi pada seseorang tidak muncul dengan begitu saja, Walgito (2004) menyatakan bahwa terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dinyatakan sebagai berikut: (1) dimulai dari objek yang menimbulkan rangsangan, dan rangsangan tersebut mempengaruhi alat indera atau reseptor, proses ini disebut proses alam (fisik), (2) kemudian pada rangsangan yang diterima melalui alat inderanya dilanjutkan dengan saraf sensorik ke otak, proses ini disebut proses fisiologis, (3) kemudian terjadi proses di otak yang melaluinya individu dapat mempersepsikan apa yang diterimanya pada penerima, sebagai stimulus, menerima proses yang berlangsung di otak/pusat kesadaran disebut proses psikologis. Tahap akhir dari proses perseptual adalah individu menjadi sadar akan apa yang mereka terima melalui indera mereka (*reseptor*).

Sedangkan menurut Thoha (2003), proses pembentukan persepsi didasarkan pada beberapa langkah yaitu (1) Stimulus, pembentukan persepsi dimulai pada saat seseorang menjumpai stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya, (2) proses pencatatan. Gejala yang terjadi merupakan mekanisme fisik berupa sensasi dan efek syaraf manusia melalui panca inderanya. Seseorang dapat mendengar atau melihat informasi yang dikirimkan kepada mereka dan kemudian merekam semua informasi yang dikirimkan kepada mereka. (3) Interpretasi merupakan aspek kognitif persepsi yang sangat penting, yaitu proses pemberian makna terhadap stimulus yang diterima. Proses interpretasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi dan kepribadian seseorang.



Gambar 1. Proses pembentukan persepsi model Litterer (1984) dalam Susiatik (1998)

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Thoha (2003) menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang secara umum, diantaranya: (1) faktor internal seperti emosi, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), pembelajaran, kondisi fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, minat dan motivasi, (2) faktor eksternal seperti Latar belakang keluarga, pengetahuan yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan di lingkungan, intensitas, ukuran, resistensi, pengulangan gerakan, hal baru dan familiar atau objek yang tidak asing.

Walgito (2004) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Objek yang dipersepsi

Menghasilkan rangsangan yang melibatkan panca indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu atau dari dalam individu yang terkena, bertindak langsung pada saraf penerima, yang bertindak sebagai reseptor. Daya tarik terbesar, bagaimanapun, datang dari luar individu.

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Berfungsi untuk menerima rangsangan. Selain itu, saraf sensorik juga harus hadir untuk mengirimkan rangsangan yang diterima oleh reseptor ke pusat sistem saraf, yaitu. transmisi jawaban. membutuhkan saraf motorik.

3. Perhatian

Mengenali atau memicu suatu pengamatan membutuhkan perhatian, yang merupakan langkah pertama dalam persiapan untuk menghasilkan pengamatan. Perhatian adalah konsentrasi atau fokus dari semua kegiatan individu pada sesuatu atau sekelompok objek .

Sedangkan menurut Robbins (1996) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Ketika seseorang melihat sesuatu dan mencoba menginterpretasikan apa yang mereka lihat, mereka dipengaruhi oleh karakteristik individu mereka seperti sikap, motif, minat, pengalaman, pengetahuan dan harapan.

2. Sasaran dari persepsi

Obyek pengamatan dapat berupa orang, benda atau peristiwa. Ciri-ciri tersebut biasanya mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Persepsi objek tidak terlihat dalam teori tetapi dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal ini membuat seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda atau peristiwa yang serupa dan membedakannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

3. Situasi

Pengamatan harus dilihat dalam konteks, yaitu perhatian harus diberikan pada situasi di mana pengamatan tersebut dilakukan. Situasi merupakan faktor yang mempengaruhi proses pembentukan persepsi.

Faktor-faktor tersebut membuat pengetahuan individu berbeda dan mempengaruhi pengetahuan individu terhadap suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut sebenarnya sama. Persepsi seseorang atau kelompok bisa sangat berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain, meskipun situasinya sama.

Penelitian Dewi (2011) menunjukkan bahwa pandangan petani terhadap manfaat lingkungan dan sosial dari hutan rakyat, baik monokultur maupun tumpang sari, tinggi. Sebaliknya, persepsi petani di hutan rakyat monokultur dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu: tingkat pendidikan dan pekerjaan sampingan dibandingkan dengan faktor eksternal, sedangkan pada hutan rakyat campuran

persepsi petani dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu: kepemilikan lahan dan frekuensi pertemuan petani dibandingkan faktor internal. Pada penelitian Dewi (2011) ini hanya membahas persepsi petani pada dua pola pengelolaan saja (monokultur dan campuran), dan belum membahas pada apakah persepsi tersebut berpengaruh pada partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat.

2.4 Konsep Partisipasi

Pengertian partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah soal keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Partisipasi adalah bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang mengacu pada keterlibatan seseorang yang tergabung dalam kelompok sosial dalam kegiatan masyarakat dan berbagi kekuasaan, tanggung jawab dan manfaat. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah yang digunakan secara aktif oleh subjek data. Oleh karena itu, akan lebih tepat untuk mengartikannya sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Mardikanto dan Soebiato, 2017). Sedangkan Adi (2017) menuturkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam proses mengidentifikasi masalah dan peluang masyarakat, memilih solusi alternatif dan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengatasi masalah, dan berpartisipasi dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi..

Ndraha (2002) menguraikan partisipasi menjadi beberapa bentuk yaitu: (1) partisipasi melalui hubungan dengan orang lain sebagai awal dalam perubahan sosial, (2) partisipasi selalu memberi tanggapan serta menyerap setiap informasi, (3) partisipasi adalah suatu perasaan yang ditumbuhkan sendiri di dalam masyarakat dalam rangka merencanakan pembangunan dan pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, (5) partisipasi untuk mengembangkan, memelihara, dan menerima hasil pembangunan, (6) partisipasi untuk menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai pembangunan yang sesuai dengan rencana dan hasilnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Sinha dan Suar (2005) dalam penelitiannya membedakan partisipasi masyarakat menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi secara langsung

Partisipasi langsung meliputi ikut serta dalam kegiatan rapat secara langsung, berperan aktif dalam rapat, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan.

2. Partisipasi secara tidak langsung

Partisipasi tidak langsung antara lain mengikuti aturan yang ditetapkan, memotivasi anggota keluarga dan orang lain, dan memberikan dukungan moral untuk transparansi dalam kegiatan.

Winarto (2003) didalam penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan apabila (1) partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal secara baik oleh masyarakat; (2) partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat bersangkutan yang terlibat; (3) manfaat yang diperoleh dapat memenuhi kepentingan masyarakat, serta (4) proses partisipasi terdapat kontrol masyarakat.

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Supriatna, (2004) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan harus berpusat pada masyarakat, sehingga pembangunan sosial, pengembangan kelembagaan, dan pendidikan sosial menumbuhkan partisipasi. Ada tiga alasan utama mengapa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat penting: (1) partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan sikap masyarakat setempat yang tanpanya program dan proyek pembangunan gagal. (2) masyarakat mempercayai proyek atau program pembangunan dimana mereka lebih mengetahui seluk-beluk proyek pembangunan tersebut, (3) adanya anggapan bahwa melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hak demokrasi.

Menurut Soekanto dalam Azwar (2016), faktor-faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembangunan, ada tiga hal yaitu:

1) Faktor sosial budaya

Adanya kebiasaan atau kebiasaan yang secara tradisional bersifat statis dan tertutup terhadap perubahan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2) Faktor sosial ekonomi

Adanya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat khususnya di pedesaan, menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

3) Faktor sosial politik

Adanya birokrasi politik yang ketat dan kuat membuat masyarakat semakin tidak berdaya.

Slamet (2003) menyebutkan bahwa faktor internal merupakan faktor yang berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan. Keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Sedangkan faktor eksternal dapat dikatakan sebagai stakeholder atau semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut.

Sinha dan Suar (2005) berpendapat bahwa adanya Pemimpin dengan gaya kharismatik (tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama) dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar, sedangkan pemimpin dengan gaya otoriter dan manipulatif tidak banyak diikuti oleh orang lain karena kurang transparan dan cenderung menciptakan gayanya sendiri. Membuat keputusan dengan cara yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Meskipun keterlibatan petani beserta beberapa faktor yang mempengaruhinya, bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan hutan rakyat, baik dari segi kelestarian hutan rakyat maupun kesejahteraan petani. (Sudrajat, Hardjanto dan Sundawati, 2016). Tetapi

paling tidak bahwa partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu yang mendukung didalam keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. Hudiyani (2015) menyatakan bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat sangat penting bagi pengembangan hutan rakyat. Petani berpartisipasi ketika hutan rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam hutan rakyat merupakan bentuk partisipasi langsung petani. Keterlibatan petani juga terkait dengan kemampuan petani dalam mengelola hutan rakyat, sehingga hutan rakyat memberikan manfaat yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal (Hudiyani, 2015). Faktor internal adalah karakteristik individu yang berhubungan dengan kepribadian orang tersebut dan berhubungan dengan semua aspek kehidupan, seperti umur, tingkat pendidikan, pengalaman bercocok tanam, luas lahan pertanian, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan motivasi usaha. Faktor eksternal adalah berbagai stimulus atau rangsangan yang berasal dari atau di luar kepribadian seseorang (individu) yang menghasilkan perubahan perilaku seseorang, seperti tersedianya informasi dan dukungan pihak luar.

2.6 Pengertian Hutan Rakyat

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut sebagai hutan rakyat. Sebagaimana juga dijabarkan dalam Permenhut No: P.9/Menhut-II/2013, secara umum hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %. Berbeda dengan hutan negara, hutan negara adalah hutan yang tumbuh di tanah negara. Perbedaan antara hutan rakyat dan hutan negara terletak pada tingkat kepemilikan tanah atau jenis objek (tanah dan hutan), bukan pelaku atau subjek yang mengelola hutan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa hutan tidak dapat disebut sebagai hutan hak apabila individu atau kelompok

diberikan hak untuk memanfaatkannya. (Suharjito, 2000). Hutan rakyat sering diasosiasikan dengan sistem manajemen dan strategi penggunaan lahan terpadu untuk tanaman kayu dan non kayu, biasanya dengan tujuan dan orientasi yang dinamis dan kadang beragam (Maryudi dan Nawir, 2017). Awang *et al.*, (2001) menyebutkan bahwa Konsep hutan rakyat bukanlah kawasan yang seluruhnya ditumbuhi pepohonan, melainkan kawasan yang ditumbuhi berbagai rerumputan, tanaman pangan, tanaman pakan ternak, tanaman kayu bakar, tanaman bukan kayu, dan pohon buah-buahan. Hutan rakyat merupakan bank informasi dan bank kehidupan keluarga bagi masyarakat pedesaan di sekitar hutan, serta gambaran lanskap ekosistem yang lengkap.

2.7 Pengelolaan Hutan Rakyat

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari pengelolaan hutan rakyat adalah untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi, baik itu dari hasil kayu-kayuan, buah maupun hasil non kayu lainnya. Hutan rakyat telah menjadi primadona selama lebih dari 10 tahun dalam memenuhi kebutuhan permintaan industri di Jawa dan Bali, khususnya melalui komoditas utama yaitu Jati (*Tectona grandis*) dan Sengon (*Paraserianthes falcataria*) (Nawir, 2007). Pengelolaan hutan rakyat yang layak secara bisnis dan menguntungkan mengacu pada pengelolaan untuk memperoleh manfaat sosial yang paling bermanfaat dan menguntungkan secara ekonomi, khususnya bila dibandingkan dengan alternatif ekonomi lainnya dengan menggunakan sumber daya rumah tangga yang sama seperti lahan, tenaga kerja dan modal finansial (Nawir, Yumna dan Sumardamto, 2017). Adapun Hardjanto (2003) menyebutkan bahwa berdasarkan jenis tanamannya, hutan rakyat dapat dibagi dalam tiga bentuk pola tanam, yaitu:

1. Hutan rakyat murni (*monokultur*), merupakan hutan rakyat yang hanya terdiri dari satu jenis tanaman berkayu yang ditanam secara monokultur atau homogen;
2. Hutan rakyat campuran (*polykultur*), merupakan hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis tanaman berkayu yang ditanam secara campuran pada satu lokasi;

3. Hutan rakyat agroforestry, merupakan bentuk kombinasi penanaman yang memadukan antara tanaman berkayu (kehutanan) dengan usaha tani lainnya seperti tanaman pertanian, perkebunan, peternakan yang diusahakan secara terpadu.

Sedangkan dalam BPKH (2009), pola usaha tani hutan rakyat di Pulau Jawa dimulai dari hutan rakyat monokultur sampai pola campuran. Beberapa pola usahatani hutan rakyat yang dijumpai di Pulau Jawa secara garis besar tersusun dalam sistem campuran sebagai berikut:

- Pola 1: Tanaman kayu-kayuan yang didominasi jenis Jati
- Pola 2: Tanaman kayu-kayuan yang didominasi jenis Mahoni
- Pola 3: Tanaman kayu-kayuan yang didominasi oleh Sengon
- Pola 4: Tanaman kayu-kayuan dan tanaman semusim
- Pola 5: Tanaman kayu-kayuan, tanaman semusim dan buah-buahan
- Pola 6: Tanaman kayu-kayuan, tanaman semusim, buah-buahan, perkebunan
- Pola 7: Tanaman kayu-kayuan dan tanaman perkebunan
- Pola 8: Tanaman kayu-kayuan dan tanaman buah-buahan
- Pola 9: Tanaman kayu-kayuan, buah-buahan, perkebunan dan pakan ternak

Agroforestri adalah model budidaya yang menitikberatkan pada pemanfaatan lahan untuk menghasilkan beberapa produk pada tempat dan waktu yang sama dengan menggabungkan prinsip kehutanan dan agronomi. Komponen pohon terus berkembang dari waktu ke waktu secara dinamis dan menuntut peningkatan ruang tumbuh baik vertikal dan horizontal. Hal tersebut berakibat pada ruang tumbuh tanaman semusim menjadi sempit. Dinamika ruang dalam sistem agroforestri ditandai dengan komponen penyusun dalam memanfaatkan ruang vertikal dan horizontal (Suryanto, Budiadi dan Sabarnurdin, 2017). Kunci keberhasilan pengelolaan agroforestri adalah manajemen dalam pemanfaatan ruang vertikal maupun horizontal. Tindakan mempertahankan masa agroforestri aktif untuk tumpangsari sepanjang pengelolaan memerlukan pemahaman tentang sistem berbagai sumberdaya (*resources sharing*) khususnya dinamika pemanfaatan ruang.

Dinamika agroforestri sangat ditentukan oleh perkembangan pohon yang mengakibatkan penurunan luasan bidang olah untuk tanaman semusim. Oleh karena itu pengaturan ruang baik vertikal (RV) maupun horizontal (RH) menjadi kunci penting dalam sistem agroforestri (Suryanto, Tohari dan Sabarnurdin, 2005).

2.8 Manfaat Ekonomi Hutan Rakyat

Hutan rakyat selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diambil kayunya. Bagi petani, manfaat ekonomi dari hutan rakyat yang diperoleh dari pemanenan kayu biasanya tinggi. Permintaan kayu melebihi pasokan sehingga lebih mudah untuk memasarkan kayu dengan harga tinggi. Petani yang memanen kayu sesuai dengan daur tebang yang dijadwalkan cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada petani yang memanen kayu sesuai dengan daur butuh. (Puspitojati *et al.*, 2014). Hutan rakyat kayu adalah usaha jangka panjang yang hasilnya dikumpulkan pada akhir siklus. Di areal sempit, petani mengelola kayu semua umur atau berbeda dalam satu petak. Oleh karena itu, hutan rakyat pohon biasanya tidak menghasilkan pendapatan tahunan. Dalam keadaan seperti ini, usaha hutan rakyat tidak menjadi usaha utama petani, melainkan usaha sampingan yang berfungsi sebagai tabungan. Petani dapat menggunakan pendapatan dari hutan rakyat besar untuk berbagai keperluan, seperti meningkatkan modal usaha atau membiayai hajatan maupun naik haji (Puspitojati *et al.*, 2014).

Selain hasil kayu, secara ekonomi hutan rakyat juga menghasilkan hasil hutan non kayu seperti tanaman bawah tegakan (Jahe, Kunir, Laos, Porang, dll), Madu, Getah, Buah-buahan maupun Bambu. Hasil hutan non kayu tersebut ketika diolah menjadi produk lebih lanjut akan memiliki nilai ekonomi lebih. Kayu dan hasil hutan non kayu ini juga dapat disebut sebagai nilai penggunaan langsung. Nilai penggunaan langsung adalah manfaat yang langsung diambil dari sumber daya alam. Nilai ini dapat diperkirakan melalui kegiatan konsumsi atau produksi, misalnya ikan atau hasil hutan (Alam, Supratman and Alif, 2009).

Dalam penelitian Irundu, dkk (2018) pada hutan rakyat di Desa Mirring, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, besarnya nilai ekonomi langsung dari berbagai tipe pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Nilai Ekonomi Langsung berbagai tipe pengelolaan hutan rakyat di Desa Mirring, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat

No	Sistem hutan rakyat	Nilai ekonomi (Rp/tahun)		Total
		Kayu	HHBK	
1.	Monokultur	71.728.608	-	71.728.608
2.	Polykultur	97.894.958	-	97.894.958
3.	Agroforestry	21.545.490	106.416.667	127.962.157
Total (Rp)		191.169.056	106.416.667	297.585.723

2.9 Manfaat Ekologis Hutan Rakyat

Hutan rakyat atau hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal, memiliki sejumlah manfaat ekologis yang penting. Hutan rakyat dapat menjadi tempat perlindungan bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman hayati yang tinggi di dalam hutan rakyat membantu menjaga ekosistem yang seimbang dan mempertahankan keanekaragaman genetik, hutan rakyat menyediakan habitat yang penting bagi flora dan fauna. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang bergantung pada hutan rakyat untuk mencari makan, tempat berlindung, berkembang biak, dan melakukan migrasi. Berperan penting dalam mengatur aliran air dan menjaga kualitas air di daerah sekitarnya. Hutan rakyat membantu menyaring air hujan, mengurangi erosi tanah, dan menjaga ketersediaan air melalui penyimpanan air dalam ekosistem hutan.

Hutan rakyat memiliki kemampuan untuk menyerap air hujan secara efisien, yang dapat mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Akar pohon dan lapisan vegetasi di hutan rakyat membantu memperkuat tanah, mencegah erosi, dan menjaga kestabilan lereng. Melalui proses fotosintesis, pohon dan vegetasi di dalam hutan rakyat menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomassa mereka. Ini membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca dan membantu mitigasi perubahan iklim. Menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, oksigen yang dihasilkan oleh pohon dan vegetasi membantu menjaga keseimbangan oksigen-karbon di atmosfer dan mendukung kehidupan manusia dan hewan. Hutan rakyat dapat berperan dalam pemulihan dan restorasi ekosistem yang

terdegradasi. Masyarakat lokal dapat melakukan upaya penanaman kembali, menjaga kelestarian hutan, dan mengurangi aktivitas yang merusak ekosistem. Menjadi sumber pendidikan dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat lokal dan generasi mendatang. Melalui interaksi dengan hutan rakyat, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

2.10 Manfaat Sosial Hutan Rakyat

Hutan rakyat memiliki sejumlah manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat, manfaat utama hutan rakyat dari segi sosial seperti: a) Penghidupan dan mata pencaharian, hutan rakyat sering kali menjadi sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Masyarakat dapat mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, buah-buahan, tumbuhan obat, atau hasil hutan non-kayu lainnya untuk dijual atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. b) Keamanan pangan dan sumber Air: Hutan rakyat seringkali memberikan kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan air masyarakat. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan hasil pertanian di dalam atau di sekitar hutan rakyat, serta mendapatkan akses ke sumber air yang dijaga oleh hutan. c) Warisan budaya dan identitas, hutan rakyat seringkali memiliki nilai budaya dan identitas yang kuat bagi masyarakat. Hutan ini mungkin menjadi tempat suci, memiliki nilai spiritual, dan melibatkan tradisi dan praktik lokal yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Hutan rakyat memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya dan identitas komunitas. d) Pendidikan dan pengetahuan, hutan rakyat menyediakan kesempatan pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat lokal. Generasi muda dapat belajar tentang flora, fauna, ekologi, serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan hutan. Hutan rakyat juga dapat menjadi laboratorium alam yang penting untuk pengamatan, penelitian, dan pembelajaran tentang lingkungan alam. e) Partisipasi masyarakat dan penguatan komunitas, melalui pengelolaan hutan rakyat, masyarakat lokal dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan perlindungan sumber daya alam. Ini dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menguatkan komunitas, dan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. f) Pariwisata dan ekonomi lokal, hutan rakyat yang dikelola dengan baik dapat menjadi daya tarik pariwisata bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang autentik. Hal ini dapat memberikan peluang ekonomi lokal melalui sektor pariwisata, seperti penginapan, transportasi, dan usaha-usaha lain yang terkait. g) Kesehatan dan kesejahteraan, keterlibatan dengan hutan rakyat dan akses terhadap alam dapat memberikan manfaat kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Aktivitas seperti berjalan-jalan di hutan, berkebun, atau mengikuti tradisi dan upacara terkait hutan dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional.

2.11 Hutan Rakyat sebagai Budaya Masyarakat

Ekosistem mencakup segala aspek hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, dimana saling terjadi interaksi serta hubungan timbal balik. Dalam hal ini manusia merupakan bagian dari makhluk hidup dan hutan rakyat merupakan bagian dari lingkungan. Aryadi (2012) menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari sangat memerlukan keberadaan tanaman hutan rakyat (lingkungan fisik), baik itu sebagai sumber penghidupan (mata pencaharian, lapangan pekerjaan) maupun sebagai perlindungan (pengatur tata air, serangan hama, kebakaran hutan). Disisi lain tanaman juga memerlukan manusia yang dapat mengatur pertumbuhan melalui jarak tanam, pemberian pupuk serta pemeliharaan tanaman. Hubungan timbal balik sangat terlihat dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat ini. Dalam penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa adanya kegiatan hutan rakyat ternyata sangat mempengaruhi sistem yang sudah terbangun dimasyarakat sebelumnya. Seperti mulai mengenal teknologi dalam pengelolaan tanaman, sistem ekonomi yang mulai mengenal lembaga perkreditan keuangan, sistem sosial yang mulai terlihat pada peningkatan kerjasama dan rasa kekeluargaan. Bahkan hingga pada aspek sistem budaya, dimana pada awalnya menganut pola perladangan berpindah menjadi menetap serta yang tadinya menanam tanaman sayuran menjadi tanaman tahunan. Kegiatan pengelolaan hutan

rakyat yang dikembangkan pemerintah telah membuat masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah.

Dewi (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan hutan rakyat di hutan rakyat campuran merupakan budaya baru karena pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan rakyat ada setelah mengikuti program dari pemerintah untuk mengelola lahan terbengkalai menjadi hutan rakyat. Sehingga banyak petani yang tadinya hanya mengelola lahan persawahan dan perkebunan, mulai beralih dan menjadi petani hutan rakyat juga. Berbeda dengan hutan rakyat monokultur, dari dahulu lahan hutan rakyat tersebut sudah ada dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengelolaan lahannya juga bukan merupakan suatu budaya baru karena lahan sudah ada, walaupun ada hal baru yang diterapkan dalam teknik mengelola lahan tapi hal baru tersebut tidak sepenuhnya merupakan budaya baru. Hal-hal yang dirubah hanya cara dalam mengelola lahan yang lebih baik

Penelitian Rohadi (2012) menyebutkan bahwa petani di Kabupaten Gunungkidul memandang hutan menjadi bagian penting dari budayanya. Tanaman jati memegang peranan yang cukup penting dalam usahatani, dimana dipandang sebagai tabungan keluarga dan menjadi sumber uang yang penting disaat darurat. Petani di Kabupaten Gunungkidul mengusahakan tanaman jati terintegrasi dengan tanaman pangan di bawahnya, sedangkan sistem pemanenan tanamannya dengan sistem tebang butuh. Tebang butuh ini mengandung arti bahwa tanaman jati baru ditebang ketika petani membutuhkan dana untuk dijual atau membutuhkan kayu tersebut sebagai bahan baku pembuatan rumah maupun peralatan rumah tangga lainnya. Survey rumah tangga yang dilakukan oleh Rohadi dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dua alasan utama menanam jati di lahan mereka adalah tabungan keluarga dan dana darurat (52%); dan karena tanaman jati diwarisi dari orang tua mereka dan telah menjadi tradisi/warisan budaya (37%), sementara 11% menyebutkan alasan pemasaran, lingkungan dan lain-lain.

2.12 Hutan Rakyat di Kabupaten Pati

Perkembangan kebijakan hutan rakyat di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fase (Aryadi, 2012) yaitu orde lama, orde baru dan orde reformasi. Pada era Orde Lama, sekitar tahun 1945, karena kebutuhan kayu yang

semakin meningkat, maka dilancarkan gerakan penanaman hutan dengan tujuan menanam pohon, buah-buahan dan tanaman lainnya di lahan terbuka. Kemudian pada tahun 1956 lahir gerakan lain bernama Karang Kitri, bercocok tanam di ladang dan tanah-tanah rakyat berupa tanah kosong. Gerakan penghijauan dan karang-jeruk ini membuahkan hasil yang cukup memuaskan, antara lain di sebagian Pulau Madura yang sebelumnya gurun dan mengering menjadi kawasan hijau, dan di kawasan Gunungkidul. Djajapertjunda dalam Aryadi (2012) menyebutkan bahwa pada periode orde lama kegiatan hutan rakyat lebih banyak di laksanakan di pulau Jawa, hal yang mendasari antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas hutan negara yang tidak memadai di Jawa;
2. Produksi kayu dari hutan negara tidak mencukupi kebutuhan penduduk Jawa;
3. Ketersediaan lahan tidak produktif;
4. Pertumbuhan industri kayu di Jawa;
5. Hutan lindung yang jumlahnya terus berkurang sehingga berisiko mengganggu keseimbangan air;
6. Masyarakat semakin menyadari peran ekonomi dan sosial hutan rakyat.
7. Sebagai penyangga kehidupan yang dapat mengatur suplai air, mencegah banjir, mengurangi erosi dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Selama orde baru, Program Bantuan Penghijauan dibuat pada tahun 1976/1977, yang dilakukan di luar kawasan hutan negara, termasuk hutan rakyat, dan yang tujuannya adalah untuk mempercepat penanaman di lahan kosong milik rakyat. Tahun berikutnya, pemerintah juga membuat program penghijauan nasional dan program aksi untuk membenahi dan mengendalikannya. Pemerintah juga membentuk Balai Konservasi Hutan dan Tanah (PKT) yang didukung oleh Balai Reklamasi dan Konservasi Tanah (BRLKT) sebagai perencana kegiatan. Selama itu, program hutan rakyat berfokus pada pemulihan tanah di kawasan yang masih terdegradasi untuk memungkinkan lebih banyak tanaman berkayu seperti Sengon, Akasia, dan Lamtoro. Tujuan pembangunan hutan rakyat pada era orde baru antara lain:

1. Lahan milik rakyat yang peruntukannya tidak sesuai untuk pengelolaan semusim tetapi cocok untuk kehutanan;

2. Lahan milik rakyat dan konversinya menjadi hutan lebih layak secara ekonomi daripada bentuk pengelolaan lainnya;
3. Tanah rakyat di hulu sungai yang ditinggalkan;
4. Tanah rakyat dengan kemiringan lebih dari 50%, yang karena sifatnya sehingga perlu dihutankan;
5. Tanah rakyat yang merupakan sumber air dari sudut pandang khusus;
6. Tanah desa, marga atau adat yang terabaikan atau kritis.

Di era reformasi, disahkan Undang-Undang Pemerintah Provinsi No. 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa bidang kehutanan dapat dilimpahkan ke tingkat daerah atau kabupaten/kota. Kotamadya memiliki kewenangan untuk memanfaatkan (hasil) hutan dan memanfaatkan kawasan, yang dapat diartikan bahwa semua kegiatan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, restorasi dan perlindungan hutan juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah negara. Selain itu, khusus di bidang kehutanan, pemerintah memiliki UU No. Pasal 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang membagi hutan menjadi hutan negara dan hutan hak tergantung pada kondisi hutan. Hutan hak milik yang dibebani dengan hak milik sering disebut sebagai hutan rakyat. Permenhut No: P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak menguraikan bahwa hutan hak (hutan rakyat) mempunyai tiga fungsi yaitu (1) fungsi konservasi, (2) fungsi lindung, dan (3) fungsi produksi.

Kemudian pada tahun 2014, pemerintah memberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 32 Tahun 1999. Undang-undang ini diundangkan untuk menggantikan undang-undang sebelumnya karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan negara dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan bidang kehutanan dilimpahkan kepada provinsi dan tidak lagi kepada kabupaten/kota. Di sektor kehutanan, perubahan ini sangat mempengaruhi proses pengelolaan hutan, termasuk pengelolaan hutan, dan mempengaruhi pengaturan kelembagaan (organisasi, personel, infrastruktur, anggaran) dan peraturan pemerintah. Pembangunan sektor kehutanan mencakup banyak program termasuk penguatan pengelolaan hutan di tingkat lokal (untuk mencapai kelestarian hutan dan

kesejahteraan masyarakat) melalui pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pemerintah negara bagian harus mendirikan fasilitas KPH baru dan mengurus staf, infrastruktur, pendanaan dan pengiriman dokumen (P3D).

Kabupaten Pati secara administratif memiliki luas daratan 150.368 Ha. Data BPS (2018) menunjukkan total luas hutan rakyat di Kabupaten Pati adalah 34.683 Ha, sedangkan di Kecamatan Cluwak sendiri hutan rakyatnya seluas 3.700 Ha (berkontribusi 10,67% terhadap luasan total di seluruh Kabupaten Pati). Sedangkan untuk luas kawasan hutan (hutan negara) di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 3 dibawah.

Tabel 4. Luas Kawasan Hutan (Hutan Negara) di Kabupaten Pati

Fungsi	Luas (Ha)
A Hutan Lindung	1.659,719
B Hutan Produksi	
1. Hutan Produksi Terbatas	1.667,374
2. Hutan Produksi Tetap	19.603,278

Sumber: Dishutbun (2013)

Berdasarkan morfologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Pati berupa dataran rendah dengan elevasi berkisar antara 0 – 100 m diatas muka air laut. Oleh karena itu daerah tersebut cukup potensial untuk menjadi daerah pertanian. Kondisi morfologi Kabupaten Pati dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Lereng Gunung Muria yang memanjang ke barat Laut Jawa bagian utara dan meliputi wilayah Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkali dan Cluwak.
2. Daerah dataran rendah memanjang ke utara dari tengah Laut Jawa dan meliputi sebagian wilayah Dukuhset, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabusi, Kayen Utara, Sukolilo Utara, dan Tambakromo Utara.
3. Pegunungan kapur yang memanjang ke selatan menutupi sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayeni, Tambakromo, Winong dan Pucakwangi.

Hutan rakyat yang banyak berkembang di kawasan Pati Selatan (pegunungan Kendeng) didominasi jenis tanaman Jati (*Tectona grandis*), dikarenakan jenis tanah berupa tanah kapur. Meskipun saat ini juga sudah mulai banyak ditemui masyarakat yang menanam jenis tanaman Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Masyarakat mulai tertarik untuk menanam Sengon dikarenakan daur tanamannya yang relatif pendek, umur 5-6 tahun sudah bisa dipanen. Sedangkan untuk tanaman Jati memerlukan daur yang cukup panjang hingga puluhan tahun. Hutan rakyat yang berkembang di lereng pegunungan Muria lebih kompleks dan bervariasi jika dibandingkan dengan yang berkembang di Pati bagian selatan. Secara sifat, tanah di lereng pegunungan Muria lebih subur sehingga memungkinkan untuk ditanamai banyak jenis tanaman. Tanaman keras yang banyak diusahakan oleh masyarakat adalah jenis Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Pola pengelolaan hutan rakyatnya pun lebih bervariasi, seperti monokultur, polykultur maupun agroforestry).

Inventarisasi hutan rakyat yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati pada tahun 2015 menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan hutan rakyat di Kecamatan Cluwak dilakukan dengan sistem monokultur (29%), polikultur (61%) dan agroforestry (10%) dengan pemanfaatan lahan untuk tanaman bawah sebesar 56%. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat empat jenis yang memiliki potensi paling besar yang ditandai dengan Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi, yaitu Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Jati (*Tectona grandis*) dan Weru (*Albizia procera*). Sengon menempati ranking paling tinggi karena jenis ini adalah jenis memiliki daur pendek dengan nilai ekonomis yang tinggi, sehingga antusias masyarakat untuk menanam sengon sangat tinggi. Permudaan tingkat pohon didominasi oleh jenis Sengon.